

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Jambi

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Jambi sebagai kota berkembang di Indonesia sedang berada pada fase transisi menuju kota inklusi. Berbagai upaya yang dilakukan mencakup berbagai aspek seperti dari regulasi, kelembagaan, digitalisasi layanan, hingga aksesibilitas fasilitas publik, namun secara implementasinya masih banyak yang belum terpenuhi secara standar dan konsisten. Dari sisi implementasi aksesibilitas secara fisik seperti fasilitas trotoar, taman kota, gedung layanan publik dan transportasi umum yang sebagai contohnya halte Trans Siginjai belum memiliki standar yang sesuai dengan standar aksesibilitas. Serta fasilitas umum lainnya seperti tidak tersedia *guide block* secara merata di berbagai fasilitas publik, toilet difabel yang terbatas, dan tidak adanya pendukung transportasi umum yang mendukung pengguna kursi roda. Dan implementasi mengenai aksesibilitas non-fisik seperti aksesibilitas digital belum adanya pengoptimalan lebih lanjut karena sistem layanan belum menerapkan standar internasional seperti *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG), sehingga menjadi kendala bagi penyandang disabilitas sensorik.

Aksesibilitas non-fisik di Kota Jambi menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal partisipasi penyandang disabilitas dalam pelatihan kerja forum Musrenbang, dan pendidikan inklusif. Kurangnya sumber daya manusia

mengenai pemahaman kota ramah disabilitas oleh petugas, mengakibatkan minimnya pendanaan yang dialokasikan secara khusus, serta terbatasnya dalam Unit Layanan Disabilitas (ULD) tentunya memperlemah efektivitas program yang telah dibangun.

Meskipun demikian, SLRT yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Jambi dapat menjadi potensi yang strategi yaitu sebagai jembatan antara kebutuhan penyandang disabilitas dan layanan lintas sektor, untuk itu, agar menjadi optimal sistem yang telah dibangun harus dilengkapi dengan pendekatan yang aksesibel, seperti pendampingan khusus, keterlibatan langsung antarlembaga dan partisipan masyarakat kota yang harus lebih berperan aktif. Kota Jambi dengan contoh dari kota lain seperti Surakarta, Bandung, dan Yogyakarta, harusnya telah menunjukkan bahwa pembangunan untuk mewujudkan kota ramah disabilitas dapat segera tercapai jika memiliki keberanian atas kebijakan yang telah dibentuk lewat desain universal, dan kolaborasi multi pihak.

2. Hambatan Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Di Kota Jambi

Upaya pemerintah Kota Jambi untuk menjadi kota ramah disabilitas masih mengalami sejumlah kendala yang kompleks, dimulai dari aspek fisik, kebijakan, sosial, sampai dalam permasalahan kelembagaan. Hambatan yang ada tentunya menjadi urgensi agar dapat diidentifikasi sehingga menjadi dasar

evaluasi dan pengelolaan yang lebih strategi dan lebih inklusif. Beberapa kendala tersebut adalah :

1. Hambatan Aksesibilitas Fisik

- Minimnya infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti jalur landai, toilet khusus, dan lift aksesibel pada fasilitas publik.
- Transportasi umum belum memenuhi standar aksesibilitas, seperti ketiadaan ruang kursi roda atau alat bantu suara.
- Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembangunan yang tidak memenuhi ketentuan aksesibilitas.

2. Hambatan Aksesibilitas Non-Fisik

- Kurangnya informasi publik yang inklusif, seperti layanan berbasis braille atau bahasa isyarat.
- SDM pelayanan publik belum terlatih dalam memberikan layanan ramah disabilitas.
- Belum adanya regulasi daerah khusus yang mengatur teknis pelaksanaan aksesibilitas secara menyeluruh.

B. Saran

Dalam analisis aksesibilitas penyandang disabilitas Kota Jambi berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2019 Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas maka perlu disadari bahwa perlu adanya peningkatan dalam aksesibilitas fisik maupun non fisik seperti penguatan *Front Office* (FO) yang Inklusif seperti penyediaan loket khusus disabilitas di tingkat kelurahan dan kantor pelayanan public lainnya, memberikan papan informasi secara visual serta Braillese agar alur layanan yang mudah dipahami .

1. Optimalisasi Back Office (BO) sebagai Pusat Rujukan seperti sinergivitas tim lintas sektor di BO mulai dari Tingkat pemerintahan seperti (Dinsos, Dinkes, Disdukcapil, Disdik) hal ini bertujuan untuk mempercepat penanganan kasus penyandang disabilitas.
2. Integrasi SLRT dengan Sistem Data Disabilitas Lokal seperti Memperkuat DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) mencakup kategori disabilitas (sensorik, fisik, intelektual, ganda) serta pembuatan dashboard penyandang disabilitas Kota Jambi yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan berbasis data.
3. Keterlibatan Komunitas dan Organisasi Penyayang Disabilitas (OPD) sebagai mitra resmi SLRT dalam berbagai upaya kebijakan dan kepekaan terhadap kasus, pendampingan, dan edukasi Masyarakat dalam menyikapi penyandang disabilitas

4. Digitalisasi Layanan SLRT yang Ramah Disabilitas seperti penyediaan layanan aduan dan pendaftaran bantuan secara berani melalui aplikasi mobile seperti *WhatsApp* dengan fitur *voice note* serta layanan *online* lainnya yang sesuai standar WCAG.
5. Penjangkauan Aktif oleh Petugas SLRT seperti Melakukan pendekatan door-to-door terhadap penyandang disabilitas berat dan lansia yang tidak terdata.
6. Kampanye dan Edukasi Publik seperti mengadakan *event* layanan SLRT inklusif dalam rangka Hari Disabilitas Internasional.